

**PENGARUH PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN
TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN**

(Studi Pada Desa Salahaji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat)

SKRIPSI

Oleh:

SAMUDRA SITEPU

09 851 0040



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24

Halaman Pegesahan

Judul Skripsi : **Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (studi pada desa salahaji kecamatan pematang jaya kabupaten langkat)**

Nama : **Samudra Sitepu**

NPM : **09 851 0040**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Drs. H.M.H.Thamrin Nasution, M.Si

Drs. M. Aswin Hasibuan, M.AP

Pembimbing I

Pembimbing II

Mengetahui,



Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si

Dekan

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access from (repository.uma.ac.id)15/8/24

ABSTRAK

Pemekaran wilayah kecamatan merupakan salah satu bentuk percepatan pembangunan daerah dan dianggap Menjadi lebih baik agar pengelolaan daerah semakin mudah Hal inilah yang mendasari keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran. Masyarakat merasa pelayanan yang diberikan oleh kecamatan terdahulu tidak lagi dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat yakni cepat tanggap akan keperluan masyarakat. Terlalu luasnya cakupan wilayah kerja membuat aparat kecamatan lamban dalam menanggapi keinginan masyarakat yang datang ke kecamatan untuk mengurus berbagai keperluan, selain itu juga lambannya pembangunan dari sektor infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasarana masyarakat di desa-desa. maka dari itu terbentuklah kecamatan baru yang bernama Kecamatan Pematang Jaya di Kabupaten Langkat, dengan harapan setelah pemekaran ini dilaksanakan pelayanan publik dan pembangunan Infrastruktur di kecamatan Pematang Jaya akan semakin membaik.

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk mengetahui adakah pengaruh pemekaran wilayah kecamatan terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemekaran wilayah kecamatan terhadap Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemekaran wilayah kecamatan terhadap peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Bentuk penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian *Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif dengan maksud untuk mencari pengaruh antara variabel X (bebas) dengan variable Y (terikat)*. Penelitian ini dilakukan di Desa Salahaji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisisioner, wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemekaran wilayah kecamatan Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh r sebesar 0,966 yang berarti terdapat hubungan antara variabel pemekaran wilayah kecamatan (X) dengan variabel Peningkatan pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Y), dan tingkat hubungannya adalah **Sangat kuat**. Dari perhitungan determinasi diketahui bahwa pengaruh pemekaran wilayah kecamatan terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebesar 93,31 %. Pengaruh pemekaran wilayah kecamatan terhadap Peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan adalah Signifikan yang dapat diuji melalui hasil perhitungan diperoleh nilai $t = 135,25$ sedangkan nilai t dalam tabel pada $dk = n - 2$ ($90 - 2$) yaitu 88 adalah 1,658 pada taraf signifikan 0,05. Dikatakan signifikan bila harga t hitung (135,25) lebih besar dari harga t tabel (1,658), atau dengan kata lain bila harga hitung lebih besar dari harga t table.

Kata Kunci : Pemekaran, Pembangunan dan Infrastruktur pedesaan.

ABSTRACT

Expansion of district area is one form of accelerated development of the area and considered in order to become a better local management of the easier. This is what underlies people's desire to do the expansion. People feel the service provided by the previous districts are no longer able to provide services in accordance with the wishes of the community that is responsive to community needs. Too wide scope of the work area making apparatus districts slow in responding to wishes of the people who come to the district to take care of a variety of purposes, but it is also slow development of infrastructure facilities and infrastructure to support the communities in the villages. therefore formed a new sub-district named the District Pematang Jaya in Langkat regency, the hope after this expansion carried out public services and infrastructure development in the district of Pematang Jaya is getting better.

As for the formulation of the problem in this paper is how the Effect of Redistricting Regional District Of Improvement of Rural Infrastructure Development Langkat district of North Sumatra Province with a view to finding out if the effect of splitting of districts to Improvement of Rural Infrastructure Development , to determine how much effect the regional growth districts to Development Rural infrastructure , as well as to know how to influence regional growth districts to the improvement of Rural Infrastructure Development Form of this study is to use the method of descriptive research with quantitative approach with a view to seeking effect between the variables X (free) with variable Y (bound). This research was conducted in the village of Pematang Jaya subdistrict Salahaji Langkat North Sumatra Province. While the data collection is done by distributing questionnaires, interviews and observations.

The results showed that there is a positive and significant effect between the regional growth districts Against Improved Rural Infrastructure Development. It can be seen from the calculation results obtained correlation coefficient r of 0.966, which means there is a relationship between the variables of the regional growth districts (X) with variable development of Rural Infrastructure Improvement (Y), and the degree of relationship is **very strong** . Determination of the calculation is known that the influence of the regional growth districts to Rural Infrastructure Development Improvement of 93.31 % , Influence on the regional growth districts Improved rural infrastructure is a significant development that can be tested through the calculation, the value of $t = 135.25$ while the value of t in the table at $df = n - 2$ (90-2) 88 is 1.658 which is significant at the 0.05 level . Said to be significant if the t price (135.25) is greater than the price of t table (1.658) , or in other words if the price is bigger than t table price .

Keyword : Expansion, Development and rural infrastructure.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun dengan demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “ **PENGARUH PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (studi pada desa Salahaji kecamatan Pematang Jaya kabupaten Langkat)**. Hasil penelitian ini tentunyatak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penelitian secara moril dan materil. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA** selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak **Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak **Drs.H.M.H Thamrin Nasution, M.Si** selaku Pembimbing I skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan saran kepada peneliti dalam setiap bimbingan yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

4. Bapak **Drs.M. Aswin Hasibuan, MAP** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaandan Pembimbing II skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan saran kepada peneliti dalam setiap bimbingan yang telah dilakukan.
5. Ibu **Anggreni Atmei Lubis, SH. M. Hum** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
6. Bapak **Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
7. Seluruh ibu/bapak Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
8. Bapak **MAHYUNI** selaku Kepala Desa Salahaji yang telah membantu dalam memberikan data dan informasi yang berharga sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Orangtuaku tercinta **Bahtera Sitepu, S.Pd** dan **Setik Br Ginting, S.Pd** yang tidak pernah terlambat memenuhi kebutuhan materi sejak penulis mulai menginjakkan kaki dijenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai jenjang Perguruan Tinggi hingga memperoleh gelar Sarjana, Tidak hentinya memberikan kasih sayang, nasehat, perlindungan, semangat bahkan selalu berusaha meminimalkan waktu istirahat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan penulis sehingga menjadi orang yang berguna dan sukses. Abang dan Adikku, **Restu Nesa Sitepu, S.Pd** dan **Emia Br Sitepu** yang selalu memberikan motivasi dalam aktifitas sehari-hari.

10. Seluruh Masyarakat Desa Salahaji yang telah membantu penulis dalam pengisian angket untuk kelengkapan penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
11. Sahabat Se Almamater dan Ikatan Mahasiswa Karo Arih Ersada UMA, Satma AMPI Komisariat UMA, Himpunan MahasiswaJ urusan Ilmu Pemerintahan (HIMAJIP) dan DPD Satma AMPI Provinsi Sumatera Utara, Tanpa wadah ini penulis tidak akan seperti sekarang yang mampu mandiri dan mengembangkan kemampuan diri.

Penulis sadar bahwa Skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini sangat penulis harapkan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. TerimaKasih.

Medan, Mei 2014
Penulis



SAMUDRA SITEPU
NPM : 09 851 0040

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Kerangka Pemikiran.....	5
G. Hipotesis.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Pengaruh.....	7
B. Pengertian Wilayah Dan Pemekaran Wilayah.....	7
1. Faktor Pendukung Pemekaran Wilayah.....	10
2. Konsep Pemekaran Wilayah.....	12
C. Pemerintah Kecamatan.....	13
D. Pemekaran Kecamatan.....	15
E. Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.....	16
F. Pengertian Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dan Daerah Otonom.....	17
G. Definisi Pembangunan Infrastruktur.....	19
H. Desa Dan Konsep Desentralisasi.....	22
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Metode Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Populasi Dan Sampel.....	27
1. Populasi.....	27
2. Sampel.....	27
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Variabel dan Definisi Operasional.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	33



BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Kecamatan Pematang Jaya.....	37
1. Letak Geografis	37
2. Letak Administratif	38
B. Gambaran Umum Desa Salahaji.....	39
1. Letak administratif.....	39
2. Pemerintahan	40
3. Penduduk	42
4. Pendidikan.....	42
5. Kesehatan	43
6. Transportasi.....	43
7. Pertanian	44
BAB V HASIL PENELITIAN	45
A. Penyajian Dan Analisis Data.....	45
1. Identitas Responden	46
2. Tanggapan Responden atas Angket	50
B. Pengujian Hipotesis.....	70
1. Uji Korelasi Product Moment.....	70
2. Uji Signifikan.....	72
3. Uji Determinan.....	74
4. Uji Regresi lenear Sederhana.....	75
BAB VI PENUTUP	78
A. Simpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	ix
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Rincian Sampel	29
Tabel 3.2 Tingkat skor untuk jawaban responden	31
Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Korelasi	34
Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 5.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia.....	47
Tabel 5.3 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	48
Tabel 5.4 Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	49
Tabel 5.5 Tanggapan responden terhadap Kebijakan pemekaran Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat untuk pembangunan daerah.....	50
Tabel 5.6 Tanggapan Responden terhadap Kebijakan pemekaran Kecamatan Pematang Jaya berguna untuk masyarakat.....	51
Tabel 5.7 Tanggapan responden terhadap Kebijakan pemekaran Kecamatan ini merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat Kecamatan Pematang Jaya saat ini.....	52
Tabel 5.8 Tanggapan responden terhadap adanya pemekaran kecamatan Pematang Jaya mampu memberikan kemudahan dalam mendukung aktifitas perekonomian.....	53
Tabel 5.9 Tanggapan responden terhadap Setelah pemekaran kecamatan Pematang Jaya segala urusan administrasi kependudukan mudah dan cepat.....	54
Tabel 5.10 Tanggapan responden terhadap Setelah pemekaran kecamatan Pematang Jaya ini dilaksanakan, sarana dan prasarana memadai.....	55
Tabel 5.11 Tanggapan responden terhadap Setelah pemekaran kecamatan ini dilaksanakan tidak terdapat hambatan- hambatan yang justru menyulitkan saudara dalam melakukan Aktifitas Perekonomian.....	56

Tabel 5.12	Tanggapan responden terhadap Dengan dilaksanakannya kebijakan pemekaran kecamatan Pematang Jaya ini, pihak aparat kecamatan semakin fokus dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.....	57
Tabel 5.13	Tanggapan responden Terhadap dilaksanakannya kebijakan pemekaran kecamatan Pematang Jaya ini pembangunan di desa saudara memiliki peningkatan.....	58
Tabel 5.14	Tanggapan Responden Terhadap dilaksanakannya kebijakan pemekaran kecamatan Pematang Jaya ini aspirasi/keluhan masyarakat di bidang sarana dan prasarana infrastruktur desa lebih mudah disampaikan.....	59
Tabel 5.15	Tanggapan responden terhadap Pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan di desa ini berlangsung dengan baik.....	60
Tabel 5.16	Tanggapan responden Terhadap pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan di desa ini membantu aktifitas perekonomian masyarakat.....	61
Tabel 5.17	Tanggapan Responden terhadap infrastruktur ekonomi pedesaan yang di bangun di desa ini seluruhnya bermanfaat untuk masyarakat.....	62
Tabel 5.18	Tanggapan Responden terhadap Infrastruktur ekonomi yang di bangun di desa ini kualitasnya baik.....	63
Tabel 5.19	Tanggapan responden terhadap Pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan di nikmati seluruh kalangan masya.....	64
Tabel 5.20	Tanggapan responden terhadap pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan di desa ini di bangun ke seluruh Dusun-Dusun.....	65
Tabel 5.21	Tanggapan responden terhadap Pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan di desa ini dibangun sesuai dengan kebutuhan.....	66
Tabel 5.22	Tanggapan responden terhadap Infrastruktur ekonomi pedesaan yang bangun di desa ini sudah lengkap.....	67
Tabel 5.23	Tanggapan Responden Terhadap Selama infrastruktur ekonomi yang di bangun di desa ini pengerjaannya cepat sesuai dengan target pembangunan.....	68
Tabel 5.24	Tanggapan responden terhadap Infrastruktur ekonomi yang di bangun di desa ini tepat waktu.....	69
Tabel 5.25	Interprestasi Koefisien Korelasi	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembaran angket yang disebarakan kepada responden

Lampiran 2 : Perolehan hasil tabulasi data nilai jawaban responden terhadap
Pemekaran wilayah Kecamatan

Lampiran 3 : Perolehan hasil tabulasi data nilai jawaban responden terhadap
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Lampiran 4 : Tabel Distribusi t

Lampiran 5 : Tabel Product Moment



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas luasnya, yang di perjelas dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Yang saat ini telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri.

Pemekaran kecamatan dianggap Menjadi lebih baik agar pengelolaan daerah semakin mudah. Bupati ataupun Walikota banyak yang tertarik untuk melakukan pemekaran Kecamatan, kegiatan susulan lainnya adalah penempatan lokasi pusat kecamatan agar lebih optimal dalam pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah secara Normatif menggariskan bahwa kecamatan dan kelurahan atau desa merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Urusan yang dapat dilakukan tingkat kecamatan tidak lagi harus ke tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian Kantor Kecamatan mudah di jangkau oleh seluruh warga masyarakat Desa setempat, memberi dampak efektif dan efisien dalam peningkatan pelayanan public serta Infrastruktur pedesaan yang menunjang kesehjatraan masyarakat.

Infrastruktur Pedesaan menjadi sebuah barometer dalam Pembangunan Kecamatan yang baru dimekarkan Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setempat apakah memiliki Peningkatan atau tidak, hal ini dimaksudkan adalah wilayah Kecamatan Tersebut layak atau tidak layak Untuk dimekarkan, Dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang baik perlu adanya Infrastruktur Pedesaan yang merupakan Fasilitas Masyarakat untuk menunjang Pertumbuhan Pembangunan baik segi fisik maupun ekonomi masyarakat Setempat.

Pematang Jaya merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Langkat, provinsi Sumatera Utara. Kecamatan ini dibentuk pada tanggal 19 Februari 2008 yang dibentuk dari Kecamatan Besitang dan Pangkalan Susuberdasarkan Perda No. 27 Tahun 2007. Sebelum dilakukan pemekaran wilayah Kecamatan di Pematang Jaya, Desa Salahaji merupakan Desa di wilayah Kecamatan Besitang yang jarak tempuhnya sangat jauh dari Pusat administrasi Kecamatan selain dari pada itu Pembangunan di Desa Salahaji sangat rendah yang diakibatkan Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah.

Berdasar pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan peningkatan Pembangunan di pedesaan dalam judul:

”PENGARUH PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (Studi Pada Desa Salahaji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat)”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah sangat penting dalam suatu penelitian agar diketahui arah jalan penelitian tersebut. Arikunto (1993:17) menguraikan bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya, sehingga jelas dari mana harus memulai, ke mana harus pergi, dan dengan apa ia melakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adakah Pengaruh Pemekaran wilayah Kecamatan Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan?
2. Seberapa Besar Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan?
3. Bagaimana Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Peningkatan Penmbangunan Infrastruktur Pedesaan?

C. Pembatasan Masalah

Masalah sebagaimana dikemukakan oleh RA. Suhardi (2003 : 1) adalah “suatu persoalan atau masalah yang sukar diselesaikan dan terdiri dari soal-soal yang telah diketahui sebagian, sedangkan yang sebagian lagi belum diketahui sepenuhnya, kelompok soal-soal mana yang menuntut agar cepat diselesaikan.”

Karena Banyaknya Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian ini, maka penulis membuat batasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini Dibatasi hanya berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Pedesaan.
2. Objek Penelitian adalah Masyarakat dan Infrastruktur Fisik Desa.
3. Penelitian ini dibatasi hanya di desa salahaji

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Dengan demikian, pada dasarnya tujuan penelitian memberikan informasi mengenai apa yang akan diperoleh setelah selesai melakukan penelitian (Hasan, 2002:44). Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemekaran wilayah Kecamatan terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Pemekaran wilayah Kecamatan terhadap peningkatan Pembangunan infrastruktur pedesaan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, yakni memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati jalannya implementasi Dampak pemekaran Wilayah kecamatan terhadap

- peningkatan Pembangunan Infrastruktur, serta memberikan masukan bagi masyarakat khususnya di tempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus meningkatkan peran aktifnya dalam membangun daerahnya serta lebih berfikir kritis terhadap Aparatur Pemerintah Setempat.
2. Secara akademis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepastakaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
 3. Secara Umum, Peneliti dan masyarakat akan mengetahui kinerja sebenarnya dari aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya semasa memekaran wilayah tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ilmiah, kerangka pemikiran sangat dibutuhkan dalam penelitian sebab kerangka pemikiran dapat dijadikan landasan berpikir secara logis dan efektif. Oleh karena itu kerangka pemikiran mutlak diperlukan dalam suatu penelitian.

Kerangka pemikiran dari penulisan Penelitian Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan wilayah kecamatan Pematang Jaya di Kabupaten Langkat sebelum dan setelah pemekaran, dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk mengetahui perkembangan wilayah dan upaya untuk meningkatkan perkembangan dalam pembangunan Kabupaten Langkat, sehubungan dengan diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengenai otonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan pembangunan sarana dan prasarana wilayah Kecamatan pada berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Infrastruktur bagi masyarakat melalui pemekaran wilayah kecamatan agar pembangunan dapat secara merata.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 2009:).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Jika Pemekaran Wilayah Kecamatan dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan Pengaruh Terhadap peningkatan pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 849), “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.”

Sementara itu, Surakhmad (1982:7) menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.

B. Pengertian Wilayah Dan Pemekaran Wilayah

Menurut undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dari sistemnya ditentukan oleh batas administrasi dan atau aspek fungsional.

Rustiadi et al (2007) wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan suatu unit geografis dengan batas-batas spesifik, dimana komponen-komponen didalamnya (sub wilayah) satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional (memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional).

Istilah “wilayah”, “kawasan”, atau “daerah” digunakan untuk ruang dimana “wilayah” digunakan untuk pengertian ruang secara umum, sedangkan istilah “daerah” digunakan untuk ruang yang terkait dengan batas administrasi pemerintah (Tarigan 2004).

Dalam konteks pemekaran wilayah dapat dikategorikan sebagai konsep wilayah administrative politis, yang didasarkan pada suatu kenyataan bahwa wilayah berada dalam suatu kesatuan politis yang umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau system kelembagaan dengan otonomi tertentu, sehingga wilayah administrative sering disebut sebagai wilayah otonomi artinya suatu wilayah memiliki otoritas dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan sendiri untuk mengelola sumber daya didalamnya.

Pemekaran wilayah adalah pemecahan atau pemisahan dari suatu daerah dengan wilayah induknya sebagai daerah otonom baru untuk dapat berdiri sendiri dan menjadi daerah yang mandiri dimana syarat dan ketentuan pembentukan daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

Lokasi menggambarkan posisi pada ruang tersebut (dapat ditentukan bujur dan lintangnya). Studi tentang lokasi adalah melihat kedekatan atau jauhnya satu kegiatan dengan kegiatan lain dan apa dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang berdekatan (Tarigan, 2005). Salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak menciptakan “gangguan” ketika manusia berhubungan atau bepergian dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jarak menciptakan gangguan karena dibutuhkan waktu dan tenaga (biaya) untuk mencapai lokasi yang satu dari lokasi lainnya. Selain itu, jarak juga

menciptakan gangguan informasi sehingga semakin jauh dari suatu lokasi makin kurang diketahui potensi/karakter yang terdapat pada lokasi tersebut.

Terciptanya wilayah administrasi baru, secara logika harus dapat menciptakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kewenangan lebih kepada masyarakat lokal untuk mengelolah potensi sumberdaya wilayah secara arif;
2. Partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat meningkat;
3. Efisiensi, produktivitas serta pemeliharaan kelestariannya;
4. Akumulasi dari nilai tambah secara lokal dan kesejahteraan masyarakat meningkat;
5. Prinsip keadilan dan kesejahteraan yang berkeadilan lebih tercipta, sehingga ketahanan nasional semakin kuat.

Daerah yang wilayahnya relatif luas, sehingga menyulitkan jangkauan bagi pemerintah untuk melayani warga masyarakat dipandang perlu untuk dimekarkan menjadi beberapa daerah otonom. Undang-Undang 32 Tahun 2004 hasil revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa: *“Daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Selanjutnya diatur dalam pasal 5 ayat 4 dikatakan bahwa *“syarat teknis pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kemauan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah*



penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah”.

Menurut Juanda dan Tuerah (2007), Tujuan ideal dari pemekaran wilayah adalah dapat diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme birokrat daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan pelayanan dasar publik, menciptakan kesempatan lebih luas untuk masyarakat serta dapat akses langsung pada unit-unit pelayanan publik yang tersebar dengan mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan maupun kota.

Tata cara, prosedur dan persyaratan pembentukan daerah sampai tanggal 9 desember 2007 mengacu pada PP No. 129 Tahun 2000, dimana perkembangannya persyaratan pembentukan daerah otonom baru mengacu kepada PP. No. 78 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriterion Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

1. Faktor pendukung pemekaran wilayah

Di dalam Bab III pada PP No. 129 Tahun 2000, dimana perkembangannya persyaratan pembentukan daerah otonom baru mengacu kepada PP. No. 78 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriterion Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Tertera syarat pembentukan suatu daerah baru di antaranya:

a. Kemampuan ekonomi

Cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu daerah Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan yang dapat diukur PDRB dan penerimaan daerah itu sendiri.

b. Potensi daerah

Cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari:

1. Sarana ekonomi
2. Sarana pendidikan
3. Sarana kesehatan
4. Sarana transportasi
5. Sarana pariwisata

c. Sosial budaya

Cerminan yang berkaitan dengan struktur social dan pola budaya masyarakat, kondisi social budaya masyarakat yang dapat diukur dari tempat peribadatan dan sarana olahraga.

d. Jumlah penduduk

Jumlah tertentu penduduk dalam suatu daerah.

e. Luas daerah

Nilai luas keseluruhan.

2. Konsep Pemekaran Wilayah

Tarigan (2005) Mengatakan bahwa suatu wilayah dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari pembentukan wilayah itu sendiri.

Dasar dari perwilayahan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, di Indonesia dikenal wilayah kekuasaan pemerintah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan dusun/lingkungan.
2. Berdasarkan kesamaan kondisi (homogeneity), yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik .misal adanya klasifikasi desa berupa desa pantai, desa pedalaman dan desa pegunungan. Bisa juga pembagian berupa wilayah pertanian dan wilayah industry, wilayah perkotaan dengan daerah pedalaman. Cara pembagian lainnya juga berdasarkan kesamaan social budaya, misalnya daerah-daerah dibagi menurut suku mayoritas, agama, adat isstiadat, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mayoritas masyarakat yang mendiami wilayah tersebut.
3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi, perlu ditetapkan terlebih dahulu beberapa pusat pertumbuhan yang kira-kira sama besar rankingnya kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan. Batas pengaruh antara satu kota dengan kota yang lain hanya dapat dilakukan untuk kota-kota yang sama rankingnya, kota yang lebih kecil itu senantiasa berada dibawah pengaruh kota yang lebih besar.
4. Berdasarkan wilayah perencanaan/program. Dalam hal ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah-daerah yang terkena suatu program atau proyek dimana wilayah tersebut termasuk kedalam suatu perencanaan untuk tujuan khusus. Suatu wilayah perencanaan dapat

menembus beberapa wilayah administrative berdasarkan kebutuhan dari perencanaan tersebut.

Menurut Saefulhakim (2004), mengatakan pemekaran wilayah dilandaskan pada landasan logika pembangunan agar mampu:

1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kewenangan lebih kepada masyarakat local untuk mengelola potensi sumberdaya wilayah secara arif dan bijaksana
2. Partisipasi dan rasa memiliki masyarakat meningkat.
3. Efisiensi, produktifitas serta pemeliharaan kelestariannya
4. Akumulasi nilai tambah secara lokal dan kesehjatraan meningkat.
5. Prinsip keadilan dalam kesehjatraan yang berkeadilan lebih tercipta, sehingga ketahanan nasional semakin kuat.

C. Pemerintah Kecamatan

Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa atau kelurahan. Berbeda dengan kepala desa dan lurah, kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh sekretaris camat (sekcama). Adapun seorang camat mempunyai tugas seperti disebutkan pada PP No. 19 Tahun 2008 Bab IV pasal 15 sebagai berikut:

- a. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan.
- e. Mengordinasikan penyelenggaraan dari semua kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Juga yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- h. Camat diangkat oleh bupati/wali kota atas usulan sekretaris daerah kabupaten/kota. Seorang camat harus berasal dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan. Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan bertanggungjawab kepada camat. Camat harus mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, camat tidak dapat bertindak dan berperilaku secara sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

Camat merupakan kepala wilayah kecamatan, tugas camat adalah menjalankan sebagian wewenang bupati atau wali kota yang dilimpahkan kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Misalnya, pembangunan sekola, pemeliharaan jalan kecamatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya kecamatan. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, system pemerintahan kecamatan memiliki beberapa perangkat yang mendukung penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh seorang camat. Ada beberapa lembaga yang dinamakan seksi atau bagian untuk menjalankan pemerintahan di wilayah kecamatan. Setiap seksi atau bagian tersebut dipimpin oleh seorang kepala seksi/kepala bagian yang bertanggungjawab kepada camat dengan koordinasi sekretaris camat. Semua bagian atau seksi yang ada pada pemerintahan kecamatan memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

D. Pemekaran Kecamatan

Pada era otonomi daerah sekarang ini, pemekaran wilayah tidak hanya terjadi di provinsi dan kabupaten/kota. Pemekaran wilayah juga terjadi di wilayah kecamatan. Kecamatan menurut (widjaja, 2002:12) merupakan:

“ salah satu organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah”

Adapun yang dimaksud dengan pemekaran kecamatan itu sendiri, lebih lanjut dikemukakan juga oleh wasistiono (2002:15), bahwa:

“pemekaran kecamatan adalah suatu kecamatan dimekarkan menjadi lebih dari satu kecamatan, kecamatan yang dimekarkan mendapatkan kewenangan dari bupati/wali kota dan lebih bernuansa pada peningkatan bidang pelayanan, bidang pemerintahan, dan bidang pembangunan”

Pemekaran kecamatan berarti terbentuknya kecamatan baru, kecamatan tersebut merupakan salah satu dari organisasi atau perangkat daerah yang

memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, pemekaran kecamatan atau pembentukan kecamatan baru, merupakan suatu upaya pemekaran kecamatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan public dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kecamatan.

E. Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjelaskan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dengan batasan diatas maka kecamatan bukan lagi “wilayah administrasi kecamatan” dan camat bukan lagi sebagai kepala wilayah yang memiliki kewenangan sebagai penguasa wilayah. Sebaliknya, kecamatan hanyalah merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah, yang berarti pula bahwa kedudukan camat dikecamatan tidak jauh berada dengan perangkat daerah lainnya yang ada di kabupaten, seperti halnya kepala cabang dinas, kepala UPTD dan lain sebagainya.

Dengan demikian camat secara otomatis mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan umum meliputi pengawasan, koordinasi serta kewenangan residu, namun menerima pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota, seperti halnya dinas/Badan/Lembaga teknis lainnya, hanya saja dalam bentuk pembinaan dan pengendalian secara teknis operasional. Apabila ditinjau dari status organisasionalnya, maka dalam peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2002 tentang pedoman Organisasi Perangkat

Daerah tidak disebut dengan jelas mengenai organisasi kecamatan, apakah masuk kedalam kelompok unsur staf (skretaris daerah), unsur lini (dinas Daerah) atau unsur lembaga teknis daerah (badan atau Kantor).

Menurut wasistiono (2002:20) dilihat dari karakteristik pekerjaannya, kecamatan lebih tepat dikelompokkan kedalam jajaran unsur lini, tetapi dengan nama unsur ini teknis seperti yang disadang oleh dinas daerah. Sebagai unsur lini kewilayahan, camat menjalankan tugas pokok sebagai unsur lini yaitu "to do, to act " artinya kegiatan kecamatan beserta jajarannya bersifat oprasional dalam arti memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti halnya dinas daerah lainnya.

F. Pengertian Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Dan Daerah Otonom

Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Beberapa pendapat ahli yang dikutip Abdulrahman (1997) mengemukakan bahwa:

1. F.Sugeng Istianto, mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
2. Ateng syarifudin, mengatakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud dengan pemeberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
3. Syarif Saleh, berpendapat bahwa otonomi daerah adalaah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri.

Pendapat lain dikemukakan oleh Benyamin Hoesein (1993) bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk Rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar pemerintah pusat.

Daerah otonom daerah tersebut, menurut Mairun (1979) bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemikiran otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pemerintah daerah merupakan konsekuensi adanya desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa: Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, DPRD oleh asas Ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam system Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Yang dimaksud dengan pemerintah daerah dalam Undang-Undang tersebut yaitu: Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah dan daerah otonom yaitu: Otonomi daerah adalah hak atau wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom selanjutnya disebut daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI.

G. Definisi Pembangunan Infrastruktur

Menurut Setyaningrum (1997), infrastruktur adalah bagian dari *capital stock* dari suatu negara, yaitu biaya tetap sosial yang langsung mendukung produksi. Stone dalam Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas- fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan- tujuan ekonomi dan sosial.

Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur tidak hanya merupakan kegiatan produksi yang akan menciptakan output dan kesempatan kerja, namun keberadaan infrastruktur juga memengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya.

Sementara itu The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan aset fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi final, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi dan *drainase*) serta sektor transportasi (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat, meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit dan pusat kesehatan), perumahan dan rekreasi (taman, museum dan lain-lain).
3. Infrastruktur administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan. Infrastruktur juga dapat digolongkan menjadi infrastruktur dasar dan pelengkap. Infrastruktur dasar (*basic infrastructure*), meliputi sektor-sektor yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan (*non tradable*) dan tidak dapat dipisah-pisahkan baik secara teknis maupun spasial. Contohnya jalan raya, rel kereta api, pelabuhan laut, drainase, bendungan, dan sebagainya.

Fasilitas infrastruktur bukan hanya berfungsi melayani berbagai kepentingan umum tetapi juga memegang peranan penting pada kegiatan-kegiatan swasta di bidang ekonomi. Kebutuhan prasarana merupakan pilihan (*preference*), dimana tidak ada standar umum untuk menentukan berapa besarnya fasilitas yang tepat di suatu daerah atau populasi.

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2003), pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi bernegara dan bermasyarakat lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Lebih lanjut menurut Riyadi dan Bratakusumah (2003), pembangunan pada dasarnya merupakan salah satu wujud tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan merupakan implementasi dari tugas pelayanan, dimana perhatian utamanya adalah kebutuhan masyarakat. Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan peran pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam memikul tanggung jawab pembangunan. Peran pemerintah dalam pembangunan dapat ditingkatkan antara lain melalui:

- (1) pengurangan hambatan dan kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat,
- (2) perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan social ekonomi masyarakat, dan
- (3) pengembangan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya produktif yang tersedia, sehingga memiliki nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan mereka, oleh karena itu, salah satu indikator utama untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan adalah

seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilihat dari bagaimana masyarakat dapat dengan mudah menikmati hasil-hasil pembangunan seperti listrik, air bersih, BBM, sarana, dan prasarana perhubungan/transportasi dan sebagainya.

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

H. Desa dan Konsep Desentralisasi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Terjadinya negara kesatuan yang sentralistik ternyata banyak menimbulkan dampak-dampak negatif yang tidak mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sentralisasi kekuasaan tidak memberikan insentif kepada daerah-daerah untuk meningkatkan produktivitasnya, maupun dalam memelihara sumberdaya dasar wilayah kearah berkelanjutan, oleh karena itu adanya wacana desentralisasi, kekuasaan pusat yang dilimpahkan kepada daerah-daerah otonom, diharapkan akan memperbaiki kinerja ekonomi secara lebih produktif dan berkelanjutan di masa depan. (Anwar, 2000).

Di dalam arti ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi itu adalah pelimpahan kekuasaan dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri. Logeman dalam Supriatna (1993) dalam Lumbessy (2005) mengemukakan bahwa kelaziman desentralisasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Dekonsentrasi (*Deconcentratie*) atau "*ambtelijke decentralisatie*" yaitu berkaitan dengan pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan Negara tingkat lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan didalam melaksanakan tugas pemerintahan.
- b. Desentralisasi ketatanegaraan atau *staatkundige decentralisatie* yang sering disebut juga pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (*regelende en bertuurendebevoerheid*) kepada daerah otonomi di dalam lingkungannya. Rondinelli, (1981) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan transfer atau pendelegasian wewenang politik dan hukum untuk merencanakan, membuat keputusan dan memanage fungsi-fungsi

publik dari pemerintah pusat dan lembaga lembaganya terhadap organisasi-organisasi di lapangan dari lembaga lembaga tersebut, unit-unit pemerintah, otoritas pembangunan regional, wewenang fungsional, pemerintah-pemerintah otonomi lokal, atau lembaga-lembaga nonpemerintahan.

Desentralisasi bermakna penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang diserahkan tersebut, mencakup semua kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah (UU No. 32 Tahun 2004).

Daya tarik desentralisasi tidak semata-mata bahwa dia adalah lawan dari sentralisasi, dan oleh karena itu diasumsikan memiliki kemampuan mengobati akibat-akibat buruk dari sentralisasi. Desentralisasi juga mempunyai banyak positif (B.C.Smith:1985). Hal ini secara umum dihubungkan dengan sejumlah tujuan-tujuan ekonomis dan politis. Desentralisasi secara ekonomis Dianggap mampu meningkatkan efisiensi. Desentralisasi dapat mengurangi biaya, meningkatkan output, dan *human resources* dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Secara politis, desentralisasi memperkuat demokrasi dan *accountability*, meningkatkan kecakapan warga dalam berpolitik, dan memperkuat integrasi nasional.

Abe (2002:7) mengemukakan : segi positif dari desentralisasi adalah *Pertama*, bagi pemerintah pusat, desentralisasi tentu akan menjadi jalan

(wahana) yang mengurangi beban pusat. *Kedua*, program atau rencana-rencana pembangunan yang hendak diwujudkan, akan lebih realistik, lebih mengena dan lebih dekat dengan kebutuhan lokal. *Ketiga*, memberikan kesempatan kepada daerah untuk belajar mengurus rumah tangganya sendiri, dan dengan demikian belajar untuk bisa menangkap dan merumuskan aspirasi masyarakat setempat. *Keempat*, dengan adanya pemberian kewenangan (politis kearah devolusi), maka berarti akan membuka peluang bagi keterlibatan rakyat dalam mengontrol jalannya pemerintah.

Secara spesifik, berdasarkan kepentingan nasional tujuan utama dari desentralisasi adalah:

- (a) Untuk mempertahankan dan memperkuat integrasi bangsa,
- (b) Sebagai sarana untuk training bagi calon-calon pemimpin nasional,
- (c) Untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sedangkan dari sisi kepentingan daerah, tujuan utama dari desentralisasi meliputi, antara lain:

- (a) Untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal (political equality, Local accountability, dan local responsiveness);
- (b) Untuk peningkatan pelayanan publik;
- (c) Untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Susanto et al, 2004).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi secara tepat dan gambaran yang lengkap dan Faktuaal mengenai Pengaruh pemekaran wilayah Kecamatan Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Pada penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif yakni suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut sumadi (2003:75), tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Salahaji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.



C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sebelum penelitian dilaksanakan, maka penulis harus menentukan terlebih dahulu populasi yang diteliti. Menurut Arikunto “Populasi adalah seluruh objek yang diteliti, dapat berupa orang, sejumlah barang, sejumlah tahun penjualan dan sebagainya”. Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Masyarakat yang berdomisili di Desa Salahaji, Kecamatan Pematang Jaya, Langkat yang Terdiri dari 875 Kepala Keluarga dan 3185 jiwa yang terbagi atas 6 (enam) Dusun.

2. Sampel

Terbatasnya waktu, biaya dan tenaga bagi peneliti untuk meneliti jumlah populasi di Desa Salahaji yang terdiri dari 875 Kepala keluarga, maka penulis menggunakan Taro Yamane yang dikutip oleh Jalaludin Rahmat (1998:82) dalam bukunya Metode Penelitian Komunikasi sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N \cdot (d)^2 + 1}$$

Keterangan :

n = banyaknya unit sampel

N = banyaknya populasi

d² = presisi atau tingkat kesalahan (presisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10%, dengan perhitungan 10:100 = 0,10)

1 = bilangan konstan.

Setelah itu dapat dilihat di bawah ini perhitungan pencarian sampel dengan menggunakan rumus Taro Yamane sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N \cdot (d)^2 + 1}$$

$$n = \frac{875}{875 (10\%)^2 + 1}$$

$$n = \frac{875}{875 (0.01) + 1}$$

$$n = \frac{875}{9,75}$$

$n = 89,74$ dibulatkan menjadi 90

Dengan perhitungan seperti di atas maka yang akan menjadi sampel responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 90 responden.

Dari sampel tersebut ditentukan jumlah sampel dari masing-masing dusun yang ada di Desa Salahaji. Untuk menentukan jumlah masing-masing dusun maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Startified Proposional Sampling* Teknik pengambilan sampel ini berguna untuk memperoleh sampel yang mempunyai karakteristik dalam populasi, James & Dean (1993: 245). Untuk mendapatkan sampel dengan teknik *Startified Proposional Sampling* digunakan dengan cara sebagai berikut .Bambang (2005:129)

$$\text{Sampel 1} = \frac{\text{Populasi 1}}{\text{Total Populasi}} \times \text{Total sampel}$$

Dengan menggunakan rumusan diatas, maka perhitungan Komposisi jumlah sampel adalah sebagai berikut:

1. Dusun Tualang Pindah $= \frac{115}{875} \times 90$
 $= 11,82 \rightarrow 12$ orang
2. Dusun Pekan Salahaji $= \frac{168}{875} \times 90$
 $= 17,28 \rightarrow 17$ orang
3. Dusun Palang Merah Dalam $= \frac{148}{875} \times 90$
 $= 15,22 \rightarrow 15$ orang
4. Dusun Sambirejo $= \frac{100}{875} \times 90$
 $= 10,28 \rightarrow 10$ orang
5. Dusun Air Putih $= \frac{268}{875} \times 90$
 $= 27,56 \rightarrow 28$ orang
6. Dusun Paya Rumpun $= \frac{76}{875} \times 90$
 $= 7,81 \rightarrow 8$ orang

Tabel 3.1
Rincian sampel

Nama Desa (kk)	Nama Dusun (kk)	Populasi	Sampel
Desa Salahaji	1. Tualang Pindah	115	12
	2. Pekan Salahaji	168	17
	3. Palang Merah Dalam	148	15
	4. Sambirejo	100	10
	5. Air Putih	268	28
	6. Paya Rumpun	76	8
Total	6 Dusun	875	90

Sumber: Kantor Kepala Desa Salahaji

D. Metode Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulisan memakai cara :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan sebagai usaha mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian lapangan ini guna memperoleh data atau informasi dimana penulis langsung terjun ke lapangan dengan pokok permasalahan, dengan jalan mengadakan :

- a. Observasi, yaitu studi yang sengaja dan sistematis dengan jalan mengadakan pengamatan langsung dan dibantu dengan pencatatan fenomena yang ditemukan di lapangan. Adapun objek pengamatan yang dimaksud yaitu bentuk Fisik Infrastruktur pedesaan.
- b. Kuesioner, yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket kepada responden yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi responden dalam pengisian Angket yaitu Masyarakat berjumlah 90 Kepala keluarga yang menjadi Sampel Penelitian.

Skala yang digunakan dalam instrument penelitian tersebut adalah skala *Likert*. Skala *Likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel (Sugiyono, 2005:107). Adapun bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tingkat Skor Untuk Kriteria Jawaban Responden

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

E. Variabel dan Definisi Oprasional

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan dua variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan. Kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Variabel Bebas (X)

Variabel X penelitian ini adalah “Pemekaran Wilayah Kecamatan” dengan Indikator:

- a. Urgensi dan relevansi, yaitu apakah urgensi pemekaran Wilayah Kecamatan berkaitan dengan penuntasan masalah yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten tersebut.

b. Prosedur, yaitu apakah prosedur dan syarat pemekaran kecamatan sudah ditempuh dan dipenuhi dengan benar sesuai ketentuan dan peraturan yang ditetapkan. Syarat tersebut meliputi :

1. Bagian wilayah kerja, yaitu wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat, serta adanya pembatasan lingkup wilayah kerja pemerintahan, yang meliputi kecamatan dan Desa.

2. Sarana dan prasarana yang memadai, yaitu meliputi adanya bangunan fisik kantor kelurahan yang baru, jaringan perhubungan yang lancar seperti jalan dan jembatan, sarana komunikasi yang memadai, serta fasilitas yang menunjang kegiatan pemerintahan, pelayanan, serta kemasyarakatan di Kecamatan tersebut.

c. Implikasi, yakni sejauh mana pemekaran wilayah kecamatan memberi dampak yang signifikan terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

2. Variabel terikat (Y)

Variabel Y dalam penelitian ini adalah “Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Pedesaan” dengan Indikator:

- a. Efektifitas & kualitas Pembangunan Infrastruktur Ekonomi pedesaan.
- b. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi pedesaan.
- c. Pembangunan Infrastruktur Ekonomi pedesaan yang tepat sasaran.
- d. Jangka waktu Pembangunan Infrastruktur Ekonomi pedesaan.

Nazir (2002:152) mengemukakan Bahwa definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu oprasional yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok dan diadakan kategorisasi untuk dianalisa sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah analisis kuantitatif yaitu proses analisis terhadap data-data yang berbentuk angka dengan cara perhitungan statistik untuk mengukur dampak pemekaran wilayah Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Desa Salahaji.

1. Uji Koefisien Korelasi *Product Moment*

Uji Koefisien Korelasi *Product Moment* bertujuan untuk mengetahui kuat atau tidaknya dampak antara variabel X yaitu “Pemekaran wilayah Kecamatan” dengan variabel Y yaitu “Peningkatan Pembangunan Infrastruktur pedesaan”, atau untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Teknik

korelasi yang digunakan adalah tehnik korelasi *Product Moment* dari pearson dengan rumus sebagai berikut : (Sugiyono, 2007:212) :

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n\sum X^2 - (\sum X)^2)(n\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Dimana : r = Koefisien Korelasi *Product Moment*

$\sum X$ = Jumlah skor dalam sebaran X

$\sum Y$ = Jumlah skor dalam sebaran Y

$\sum XY$ = Jumlah hasil skor X dan Y yang berpasangan

$\sum X^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X

$\sum Y^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y

n = Jumlah sampel

Selanjutnya untuk menentukan tingkat koefisien variabel data yang dianalisis, maka digunakan interpretasi koefisien korelasi yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3
Interprestasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat kuat

(Sugiyono, 2007:214)

2. Uji Signifikan

Rumus uji signifikan Korelasi *Product Moment* (Sugiyono, 2007:212) digunakan untuk uji signifikan dampak antar kedua variabel, untuk itu harus dites apakah korelasi antara variabel X (Pemekaran wilayah Kecamatan) dengan variabel Y (Peningkatan Pembangunan Infrastruktur) signifikan atau tidak. Dengan demikian perlu dilakukan uji t dengan rumus

$$t = \frac{r\sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Dimana :

t = Uji t

r = Koefisien Korelasi

n = Jumlah Data

Setelah diperoleh harga t_{hitung} , maka signifikansinya ditentukan dengan menggunakan t_{tabel} , selang kepercayaan yang dipilih adalah 90% atau dengan tingkat kesalahan 10%, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak (berarti tidak ada hubungan yang signifikan).
- b. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berarti ada hubungan yang signifikan).

3. Uji Koefisien Determinasi

Selanjutnya, untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel X (Pemekaran wilayah kecamatan) dengan variabel Y (Peningkatan Pembangunan Infrastruktur) dapat dilakukan dengan cara menghitung

koefisien determinan, dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Adapun perhitungannya yaitu sebagai berikut :

$$Cd = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

Cd = koefisien determinan

r^2 = kuadrat koefisien pearson

4. Uji Regresi Linear Sederhana

Rumus Uji Regresi Linear sederhana (Sugiyono, 2005 : 204) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel X (Pemekaran wilayah kecamatan) dengan variabel Y (Peningkatan Pembangunan Infrastruktur pedesaan), adapun rumusnya yaitu:

$$Y = a + bX$$

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum Y^2)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PEMATANG JAYA

Kecamatan Pematang Jaya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara, kecamatan ini terbentuk pada tanggal 19 Februari 2008 yang dibentuk dari penggabungan wilayah Kecamatan Besitang dengan Kecamatan Pangkalan Susu yang disahkan berdasarkan Perda No. 27 Tahun 2007 yang terdiri dari 8 desa yaitu:

1. Desa Damar Condong
2. Desa Limau Mungkur
3. Desa Pematang Tengah
4. Desa Perkebunan Damar Condong
5. Desa Perkebunan Perapen
6. Desa Salahaji
7. Desa Serang Jaya
8. Desa Serang Jaya Hilir

1. Letak Geografis

Secara geografis Kecamatan Pematang Jaya terletak pada garis $04^{\circ} 13' 33''$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 13' 27''$ Bujur Timur dengan suhu maksimum $35^{\circ} C$ dan Suhu Minimum $19^{\circ} C$. Kondisi iklim desa yang masuk wilayah kecamatan Pematang Jaya bervariasi sesuai dengan geografisnya.

2. Letak Administratif

Secara administratif kecamatan Pematang Jaya berbatasan dengan beberapa daerah lain, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Besitang dan Kecamatan Pangkalan Susu.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Susu.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Besitang dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Luas wilayah Kecamatan Pematang Jaya adalah 197,15 km² yang terdiri atas 8 Desa, ibukota Kecamatan Pematang Jaya adalah Desa Pematang Tengah. Desa terluas di Kecamatan Pematang Jaya adalah Desa Salahaji yaitu seluas 5900 Ha Dimana desa ini terletak cukup jauh dari ibukota Kecamatan Pematang Jaya.

Secara topografis wilayah di Kecamatan Pematang jaya sebagian besar mencirikan kawasan dataran Rendah dan hampir seluruhnya Kecamatan Pematang Jaya merupakan daerah perkebunan rakyat maupun Perusahaan yang tergolong wilayah Pesisir Pantai.

B. GAMBARAN UMUM DESA SALAHAJI

Desa Salahaji Merupakan Salah Satu desa dari Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, Desa salahaji adalah Desa yang terluas dan terbanyak penduduknya di Kecamatan Pematang jaya sebanyak 3185 jiwa.

1. Letak Administratif

Secara administratif Desa Salahaji berbatasan dengan beberapa daerah lain, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang
3. Sebelah timur berbatsan dengan Desa Serang Jaya
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang.

Luas wilayah Desa Salahaji adalah 5900 Ha yang terdiri atas 6 Dusun, yaitu Dusun Pekan Salahaji, Dusun Tualang Pindah, Dusun Sambirejo, dusun Palang Merah Dalam, Dusun Air Putih, dan Dusun Paya Rumpun, ibukota Desa Salahaji adalah Dusun Pekan Salahaji.

Secara topografis wilayah di Desa Salahaji sebagian besar mencirikan kawasan dataran Rendah dan hampir seluruhnya Desa Salahaji merupakan daerah perkebunan rakyat, berdasarkan Data Arsip Desa Salahaji: Perkebunan Seluas 2888 Ha, Persawahan seluas 275 Ha, Pemukiman Seluas 30 Ha dan sisanya luas sarana prasarana lain.

2. Pemerintahan

Berdasarkan Perda No. 27 Tahun 2007 Kecamatan Pematang Jaya dimekarkan dari dua wilayah Kecamatan menjadi sebuah Kecamatan yang terdiri dari 8 Desa yang salah satunya yaitu Desa Salahaji, Desa yang paling banyak jumlah dusunnya adalah Desa Salahaji yaitu 6 dusun. Dusun yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu dusun Air Putih sebanyak 905 jiwa sedangkan yang paling sedikit penduduknya yaitu dusun Paya Rumpun sebanyak 280 jiwa.

Dusun yang paling terkenal di Desa ini adalah Dusun Pekan Salahaji dimana Dusun Pekan Salahaji merupakan Ibu kota dari Desa Salahaji dimana kantor kepala desanya berada di dusun tersebut yang jarak tempuh ke Kantor Kecamatan sepanjang 12 Km.

Struktur Organisasi Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala dusun. Berdasarkan Perda Kabupaten Langkat No 17 Tahun 2007 Adapun bagan struktur organisasi dari Desa Salahaji adalah sebagai berikut :



- a. Kepala Desa, Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat, Kepala Desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kemajuan desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- c. Sekretaris Desa merupakan Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan pemerintahan Desa.
- d. Urusan Pemerintahan di pimpin oleh Kepala urusan Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan bertugas membantu Kepala desa dalam menyampaikan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan urusan pelayanan, pemberdayaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- e. Urusan Pembangunan di pimpin oleh kepala urusan Pembangunan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang perencanaan Pembangunan desa dan penataan pembangunan desa.
- f. Urusan Kemasyarakatan dipimpin oleh kepala urusan kemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa yang

- bertugas membantu kepala desa dalam bidang kemasyarakatan seperti keagamaan, kesehatan masyarakat, penggalangan dana social dan lainnya
- g. Urusan Keuangan dipimpin oleh kepala urusan keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa.
- h. Kepala dusun mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Desa didalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penduduk

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki dan Komposisi penduduk Desa Salahaji didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Jumlah penduduk Desa Salahaji tahun 2013 berdasarkan hasil proyeksi BPS sebanyak 3.185 jiwa dengan luas wilayah sebesar 5900 Ha. Penduduk Perempuan sebanyak 1580 jiwa dan Penduduk Laki-Laki Sebanyak 604 jiwa.

4. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari ketersediaan sarana pendidikan yang lengkap dan terjangkau serta tenaga pendidik yang profesional. Jumlah TK tercatat ada 3, Jumlah sekolah SD yang tercatat tahun 2013 ada 3 unit, SMP ada 1 unit.

Jumlah guru SD di Desa Salahaji sebanyak 40, guru SMP sebanyak 18 sedangkan jumlah murid SD sebanyak 315, jumlah murid SMP sebanyak 240, yang dapat dilihat dari rasio guru terhadap murid. Dengan adanya pemekaran

wilayah kecamatan ini terlihat belum adanya penambahan fasilitas pendidikan tetapi perbaikan dan pembaharuan fasilitas sudah berjalan dan sudah memadai.

5. Kesehatan

Beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah ketersediaan fasilitas kesehatan karena Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan jumlah tenaga kesehatan di Desa Salahaji mengalami peningkatan dari tahun 2011 dengan jumlah bidan meningkat dari 2 menjadi 3 orang dan jumlah dukun bersalin yang terlatih berjumlah 2 orang. Jumlah sarana kesehatan di Desa Salahaji meliputi klinik/balai kesehatan sebanyak 2 unit dan posyandu sebanyak 3 unit.

6. Transportasi

Beberapa faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah ketersediaan fasilitas Transportasi karena Transportasi merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Tersedianya sarana dan prasarana Transportasi yang memadai sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan jumlah transportasi Umum di Desa Salahaji mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebelum pemekaran Kecamatan diberlakukan, sampai sekarang jumlah Angkutan umum darat seperti Bus Umum 3 Unit, Truck umum 4 unit, ojek 12

Unit, Becak Bermotor 6 unit.Sedangkan ketersediaan transportasi Laut meliputi Perahu motor sebanyak 4 unit dan perahu tanpa motor sebanyak 2 unit.

7. Pertanian

Luas lahan pertanian di Desa Salahaji sebanyak 2888 Ha yang terdiri dari lahan perkebunan swasta dan rakyat. 275 Ha lahan sawah tanpa Irigasi atau sawah tadah hujan.

Desa Salahaji terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan Karet, hal ini dapat dilihat dari luasnya perkebunan kelapa sawit dan karet dari lahan perkebunan rakyat terdiri dari 2388 ha. Hasil pertanian lain yang juga banyak dihasilkan Desa Salahaji Seperti jagung, kelapa, Pisang dan lainnya. Jika dilihat dari segi peternakan hampir seluruh penduduk di Desa Salahaji memelihara ternak lembu dan kambing.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, kemudian setelah dilakukan analisis data secara kuantitatif, maka bab terakhir ini akan disampaikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Simpulan

1. Dari perhitungan koefisien korelasi diperoleh r_{hitung} sebesar 0,966 yang berarti terdapat hubungan antara variabel Pemekaran Wilayah Kecamatan (X) dengan variabel Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Y), dan tingkat hubungannya adalah **SANGAT KUAT**.
2. Dari perhitungan di atas diketahui nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,966. Sedangkan berdasarkan r tabel Product Moment untuk $n = 90$ pada taraf signifikansi 10% diperoleh nilai 0,27%. Karena nilai r hitung (0,966) lebih besar dari nilai r tabel (0,27), maka hubungan kedua variabel tersebut dianggap signifikan. Hal ini berarti ada hubungan yang positif antara pengaruh pemekaran wilayah kecamatan terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan.
3. Berdasarkan perhitungan Uji Determinan dapat disimpulkan bahwa, kontribusi Pengaruh variabel X (pemekaran wilayah kecamatan) terhadap variabel Y (Pembangunan Infrastruktur Pedesaan) adalah sebesar 93,31%, sedangkan sisanya sebesar 6,69% dipengaruhi oleh faktor lain.



4. Pemekaran wilayah Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat memberikan Pengaruh yang besar terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan khususnya Infrastruktur Ekonomi di Desa Salahaji, dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur ekonomi desa seperti Jalan, Jembatan, drainase, penerangan jalan, internet, penambahan armada transportasi dan Fasilitas lainnya memberikan dampak yang positif terhadap target pemerataan pembangunan Kabupaten Langkat.

5. Pengaruh dari pemekaran wilayah kecamatan terhadap peningkatan pembangunan Infrastruktur Pedesaan adalah **positif** yang dapat diuji melalui rumus regresi linier sederhana yang diperoleh persamaan $Y=2,808 + 0,922X$. Artinya apabila nilai dari variabel X (pemekaran wilayah kecamatan) dinaikkan sebanyak satu satuan, maka nilai variabel Y (peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan) pun juga akan meningkat pula. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kebijakan pemekaran wilayah kecamatan dilaksanakan dengan baik, maka peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan pun akan semakin baik pula. oleh karena itu hasil yang diperoleh sejalan atau searah dengan Hipotesis yang ada.

B .Saran

1. Walaupun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemekaran wilayah kecamatan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, namun juga harus senantiasa dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan seperti misalnya pemerintah kecamatan dan Desa lebih peka terhadap kebutuhan umum masyarakat.
2. Walaupun secara keseluruhan pembangunan telah ada di desa tersebut hendaklah pembangunan lebih merata ke seluruh pelosok dusun-dusun.
3. Pemerintah Kecamatan dan Desa melaksanakan rapat rutin terhadap kepala dusun serta tokoh masyarakat untuk mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat untuk pembangunan infrastruktur pedesaan secara bertahap demi terciptanya pemerataan pembangunan tersebut.
4. Pemerintah kecamatan dan desa harus lebih berjuang untuk terus mengusulkan pembangunan infrastruktur terhadap Pemerintah kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Benyamin. 2005. *Regional Management & Regional Marketing*, Semarang: Penerbitkkatan Ahli Perencanaan Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta.
- Hasan, Iqbal M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J. Supranto. 2009. *Statistik Teori dan Aplikasi Edisi Ketujuh*. Jakarta: Erlangga.
- Jalaludin, Rahmad.1998. *Metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- James A Black & Dean j.Champion. 1993, *Metode dan masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Eresco.
- Kodoatie, R. J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta, PustakaPelajar.
- Kuntjoro, M. 2004. *Otonomidan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategidan Peluang*. Jakarta, Erlangga.
- Nazir, Moh, 2000. *MetodePenelitian*,Ghalia Jakarta, Indonesia.
- Prasetyo, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. T Raja Grafindo Persada.
- Rustiadi et al .2007. *Kewilayahan*. Bandung: Penerbit Cipta Karya
- Saefulhakim. 2004. *Pemekaran Daerah*, Jakarta :Bumi Aksara
- Setyaningrum, E. 1997.*Analisis Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan Studi Kasus Dati II Kabupaten Sleman DIY* [Tesis]. Yogyakarta. Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada,
- Smith, B.C. 1993. *Choices in the Design of Decentralization*. Commonwealth Secretariat. London.
- Suhardi, 2003 .*Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung.Tarsito,

Sugiyono, 2003. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sumadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajawaliPers

Surakhmad, 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CiptaPustaka.

Tarigan, Robinson, 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

The World Bank. 1994. *World Development Report: Infrastructure for Development*. Oxford University Press, New York.

Wasistiono, Sadu. 2002. *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan*, Bandung: Citrapindo

Widjaja, A.W. 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa (Menurut UU No.5 1979)* Jakarta: PT Raja Grafinda Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

_____ nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Wilayah

_____ nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

_____ Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

_____ Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan

_____ Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

_____ Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan daerah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, penghapusan, dan penggabungan Daerah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

X

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 15/8/24